

Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

Rusfadana Dwi Putra^{1*}, Muhlis Madani², Nurbiah Tahir³

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the Management of Tourism Sector Levies in Increasing the Original Revenue of Takalar Regency. The type of research used descriptive qualitative. There were 10 informants used in this study .data collection techniques were observation, interview and documentation . Data analysis used the analysis process which was carried out simultaneously with the data collection process. And used 3 types of triangulation in data validation. The results showed that the management of the tourism sector levies in increasing local original income showed quite good , this was seen from the indicators (1) Planning was optimal enough to carry out development and management so that the development of tourism could develop sustainably, (2) Organizing was quite well by dividing positions according to their skills and abilities (3) Directing sufficiently maximally by trying to make planning a reality through various directions (4) Supervision that had been carried out according to management functions.

Keywords: *management, retribution, tourism*

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 10 orang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.serta menggunakan 3 jenis triangulasi dalam pengabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini dilihat dari indikator (1) Perencanaan sudah cukup maksimal dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan, (2) Pengorganisasian cukup baik dengan cara melakukan pembagian posisi yang sesuai dengan skil dan kemampuannya (3) Pengarahan cukup maksimal dengan berupaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan (4) Pengawasan yang telah dilaksanakan sesuai fungsi manajemen.

Kata Kunci : pengelolaan, retribusi, pariwisata

* rusfadana@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah mengenai pembiayaan pada hakikatnya membutuhkan sumber penerimaan yang tidak sedikit sekaligus dapat diandalkan. Kebutuhan tersebut mulai terasa khususnya pada pemerintah daerah sejak diberlakukannya desentralisasi yang pada periode tersebut, daerah sudah diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, dengan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat berdiri secara mandiri dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat menunjang pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Sarmila, dkk, 2017:360).

Pemerintah selanjutnya mengganti Undang-undang sebelumnya dengan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang berlaku sampai sekarang. Dalam Undang-undang tersebut memperbaiki tiga hal, yaitu: menyempurnakan sistem pungutan pajak dan retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan berjalannya ketiga hal tersebut maka upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan. Dalam hal ini penerimaan retribusi di sektor pariwisata cukup potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Takalar mengingat semakin banyak objek-objek wisata yang kian bertambah jumlahnya sehingga pemasukan dari sektor tersebut cukup menunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar.

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat membangun daerahnya secara mandiri yang membuat pemerintah daerah mau tidak mau harus melepas ketergantungan terhadap dana perimbangan dari

pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masi lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perlunya pengelolaan yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar tentunya dapat berpengaruh pada jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata Kabupaten Takalar. Karena sebagian besar wisatawan hanya mengetahui kawasan wisata seperti seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Gili Trawangan sampai Bali. Oleh karena itu diperlukan adanya penggalian destinasi lain seperti di kawasan Takalar - Sulawesi Selatan. Potensi wisata terutama pantai dan laut yang indah di Takalar memang begitu indah, namun belum dikelola dengan baik. Terlebih dana pembangunan yang terbatas serta investor asing yang belum mengetahui potensi Sulawesi Selatan, harus secara agresif diperkenalkan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar merupakan suatu instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas dalam proses pengelolaan retribusi daerah. Dalam hal ini masih membutuhkan perhatian yang lebih agar pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar dapat ditingkatkan khususnya disektor pariwisata. Berbagai fenomena

permasalahan dalam pendapatan asli daerah dijadikan langkah awal peneliti untuk mengetahui pengelolaan retribusi daerah disektor pariwisata dengan harapan penerimaan retribusi disektor pariwisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar. Disilah peran pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan fungsi manajemen yang meliputi indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan dan pencapaian tujuan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur.

Adisasmita (2014:22) mendefinisikan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Handoko (2011:8) juga mengemukakan bahwa Pengelolaan atau yang disebut juga Manajemen merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan / penggerakan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, G.R. Terry dalam buku *Principles of Management* bahwa fungsi-fungsi pokok manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. Adapun pengertian perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Pengorganisasian menurut Siagian merupakan pengelompokan kegiatan-

kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan serta wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Pengawasan menurut G.R Terry dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Menurut Suparmako dalam Bella, dkk (2014) Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya

pembayaran retribusi tersebut. Kemudian retribusi menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Pasal 18 Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Pasal 2-3 Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum, 2. Retribusi Jasa Usaha, 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Marihot, 2006).

Pajak berbeda dengan retribusi daerah baik dari segi pemungutannya maupun pengelolaannya, karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibannya maka sudah sewajarnya jika kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusi sepenuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut. Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan seperti perluasan basis retribusi, pengendalian terhadap kebocorandana retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

Ciri-ciri retribusi daerah yaitu Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturanyang berlaku untuk umum (dalam hal ini undang-undang dan perda), dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, adanya kontraprestasi yang dapat di rasakan secara langsung, retribusi dikenakan pada setiap badan yang mengenyam jasa yang diberikan oleh pemerintah, dan hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.

Retribusi obyek pariwisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung dan pedagang yang ada di

dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusipariwisata termasuk dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa umumtidak bersifat komersial dalam artian jika ada keuntungan daripenerimaan retribusi, sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan pariwisata itu sendiri, baik untuk pengelolaannya, promosi dan lainsebagainya terkait obyek pariwisata. Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan lokasipariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi masuk/pengunjung, retribusi pedagang, retribusi parkir.

Pendapatan asli daerah menurut Halim (2012) adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Djaenuri (2012) adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah: a) Hasil pajak daerah kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah, b) hasil retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba dari BUMD serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga, d) penerimaan lain-lain yang sah lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan penjualan aset daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan menggunakan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan di

luar yang sudah ditetapkan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mencari data yang akurat dari keterangan dari pegawai, dan pelaksana pembangunan yang mengetahui banyak hal tentang proses pembangunan. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari referensi buku pembangunan nasional, dan statistik pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Takalar. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara $5^{\circ}3'$ sampai dengan $5^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}22'$ sampai $119^{\circ}39'$ Bujur Timur. Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan disebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Kecamatan Polombangkeng Utara adalah kecamatan terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan tersebut sebesar 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.

Jumlah hari ujian dalam setahun sekitar 142 hari dengan curah hujan rata-rata $285,5 \text{ mm}^3$ per bulan. Jumlah hari hujan terbanyak berada dibulan Januari, yaitu sebanyak 24 hari. Meski begitu, curah hujan yang paling tinggi terjadi dibulan Desember dengan intensitas sebesar 726 mm^3 .

Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD selama tiga tahun terakhir (2016-2018)

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 presentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD sebesar 69,3% hal ini berarti bahwa sumbangan retribusi pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 69,3% atau retribusi pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp. 83.163.000.

Pada tahun 2017 presentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD sebesar 35,08% hal ini berarti bahwa sumbangan retribusi pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 35,08% atau retribusi pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp. 42.100.000. Pada tahun ini kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan.

Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD sebesar 56,7% hal ini berarti bahwa sumbangan retribusi pariwisata terhadap PAD adalah sebesar 56,7% atau retribusi pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp. 359.661.313. Pada tahun ini kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD mengalami kenaikan.

Pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. Dengan ini peneliti akan menjelaskan indikator-indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi tersebut. Pengelolaan merupakan suatu

proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan agar dapat mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu.

Demikian juga dengan pengelolaan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Takalar yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam melakukan pelaksanaan senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan retribusi objek wisata Kabupaten Takalar diseskripsikan sebagai berikut.

Teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis hasil penelitian tentang pengelolaan retribusi objek wisata yang ada di Kabupaten Takalar sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R Terry yang menyatakan bahwa proses manajemen terdiri dari *Planning, organizing, actuating, Dan controlling*.

Perencanaan

Perencanaan menurut Siagian adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan perencanaan yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Siagian. Hal ini dikarenakan perencanaan dalam pengelolaan retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar telah direncanakan dengan baik dengan melihat hasil pemaparan informan terkait perencanaan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar telah memikirkan dengan matang bagaimana suatu pariwisata akan dikembangkan dan dikelola agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan serta dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan perencanaan ada kegiatan yang harus dilakukan yaitu melakukan prakiraan atau rencana

kegiatan organisasi. Prakiraan tersebut berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya oleh suatu organisasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi khususnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar yang mengelola objek wisata di Kabupaten Takalar.

Melihat dari keindahan alam, serta keragaman budaya yang dimiliki Kabupaten Takalar maka sangat menguntungkan apabila hal-hal tersebut dikelola sertadikembangkan, semua itu bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan alamserta dapat menjadi penunjang untuk meningkatkan PAD. Pengelolaan retribusi sektor pariwisata adalah suatu pengendalian atau penyelenggaraan berbagai sumber daya pariwisata secara berhasil guna mencapai sasaran yang diinginkan khususnya demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Agar pengelolaan yang dilakukan dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan maka yang mengelola harus mempertimbangkan semua aspek mulai dari perencanaan, prinsip-prinsip, dan teknik apa saja yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata. Dalam pengelolaan retribusi pariwisata tentu juga membutuhkan suatu

perencanaan yang matang agar pariwisata yang dikelola dapat memberikan dampak positif baik bagidaerahnya maupun bagi masyarakatnya.

Melaksanakan perencanaan perlu adanya kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan perkiraan yang berfungsi agar penentuan rencana kegiatan yang akan dihasilkan oleh Bidang Pariwisata Daerah Kabupaten Takalar sebagai upaya dalam mencapai tujuan haruslah memperhatikan berbagai aspek, sumber daya manusianya dan melakukan analisis terhadap potensi objek wisata untuk pemungutan retribusi di sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang perlu diperhatikan pula dalam melakukan perencanaan yaitu bagaimana perencanaan itu harus jelas maksud dan ruang lingkungnya.

Berbagai hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dalam pengelolaan retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar telah direncanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemaparan tersebut bahwa pemerintah Kabupaten Takalar telah memikirkan dengan matang bagaimana suatu pariwisata akan dikembangkan dan dikelola agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan serta

dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

Planning yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar dengan melakukan identifikasi masalah kemudian dianalisis untuk segera dibuatkan program, hal tersebut menjadi suatu mekanisme kerja agar pengelolaan retribusi tersebut dapat terus berjalan sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat.

Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut Siagian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan serta wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan pengorganisasian yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Siagian. Hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti terkait tentang pengorganisasian bahwa di Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga Kabupaten Takalar telah menempatkan setiap seksi, bidang, staf dan pelaksananya pada posisi yang sesuai dengan skil dan kemampuannya

agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap pengelompokan pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten Takalar juga memperhatikan domisili pegawainya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Proses pengorganisasian yang baik dilaksanakan oleh para pimpinan diantaranya yaitu melakukan pembagian pekerjaan kepada orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan keahliannya masing-masing agar suatu pekerjaan atau program dapat ditangani oleh orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Misalnya dalam suatu instansi, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk struktur organisasi, setelah itu baru dibagi menjadi beberapa jabatan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam hal pengorganisasian sudah menunjukkan hal yang baik sesuai dengan prinsip manajemen, hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti bahwa setiap seksi, bidang, staf dan pelaksananya telah menempati posisi

yang sesuai dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengarahan

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengarahan sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Siagian. Hal ini dikarenakan pengarahan dalam pengelolaan retribusi di sektor pariwisata Kabupaten Takalar telah dilakukan dengan baik dengan melihat hasil pemaparan informan terkait pengarahan bahwa setiap pembagian tugas yang telah direncanakan sebelumnya sudah dikerjakan dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hasil wawancara tersebut telah menjelaskan bahwa setiap pegawai yang ada merupakan satu kesatuan yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan, hal tersebut terlihat dari koordinasi yang dilakukan dalam pemungutan retribusi daerah.

Actuating yang pada dasarnya merupakan usaha dalam menggerakkan seluruh orang yang terkait dalam suatu instansi maupun organisasi untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang dengan cara yang baik dan benar.

Berbagai hasil wawancara tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam fungsi dan peran *actuating* yaitu berupaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dengan koordinasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.

Pengawasan

Pengawasan menurut G.R Terry dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan *standard* (ukuran). Berdasarkan hasil temuan di lapangan pengawasan yang

dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar khususnya dalam pengelolaan retribusi sektor pariwisata belum maksimal dengan apa yang dikatakan oleh G.R Terry. Hal ini dikarenakan Kepala maupun staf yang bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusi sudah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi pada objek wisata, namun mereka belum melakukan perbaikan pada fasilitas –fasilitas objek wisata maupun fasilitas dalam melaksanakan pungutan retribusi, yang mengakibatkan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa tindakan perbaikan dalam pengawasan terhadap adanya permasalahan yang ada di objek wisata telah ditanggapi dengan cara mengajukan pelaporan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk ditindak lanjuti.

Dengan melihat semua hasil wawancara mengenai pengawasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar berdasarkan langkah-langkah pengawasan belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari beberapa

wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.

Pengelolaan retribusi sektor pariwisata secara lebih mendalam merupakan hal yang sangat menarik dan sangat potensial untuk dikembangkan terutama pada sisi retribusi. Pengelolaan retribusi sektor pariwisata yang sesuai dengan konsep manajemen (pengelolaan) tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap peningkatan suatu daerah.

KESIMPULAN

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sudah cukup maksimal dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan agar perkembangan pariwisata dapat berkembang dengan berkelanjutan serta dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga cukup baik dengan cara melakukan pembagian posisi yang sesuai dengan skil dan kemampuannya agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengarahan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sudah cukup maksimal dengan berupaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan melalui berbagai pengarahan dengan koordinasi dan motivasi kepada seluruh pegawai.

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affandi. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Galia Indonesia.
- Bella, Cantika, Imam Hanafi, Abdul Wachid. 2014. *Kontribusi Retribusi Pasar Wisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Administrasi Publik.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Marihot, P Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarmila, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 2017. *Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar*. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. 3, h. 360
- Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: CV. Mandar Maju.